

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ali Ahmad Chomazah, 2007, *Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Amiruddin dan Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional, 1993, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Bumi Bhakti Adhi Guna, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, UUPA, Isi, dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta
- Effendie B., 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. I*, Alumni, Bandung.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, S. Arie, 1999, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya.
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta
- Mukti Fajar et al., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Ruchiyat Eddy, 1995, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960*, Alumni, Bandung.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang

Saleh, Wantjik, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Santoso U, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, cetakan keempat Liberty, Yogyakarta

Sudjito, 1987, *PRONA: Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty, Yogyakarta.

Supranowo, 1992, *Sertipikat dan Permasalahannya (dalam seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya)*, Kerjasama Badan Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tim Fokusmedia, 2012, *Badan Pertanahan Nasional*, Fokus Media, Bandung.

Urip Santoso, 2015, *Peroleh Hak Atas Tanah*, Kencana, Bandung.

Parlindungan A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung

### **Jurnal:**

Agus Fauzi, 2011, *Sertifikat Tanah di Indonesia*, Lantea Hukum, Vol 2(1): 120-122.

Emir Joni, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab pada Sertifikat Cacat Hukum*, Fiat Jursita, Vol.5(2): 90-99.

Esti Aryani, 2014, *Pelanggaran Hak Atas Tanah dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.11(2): 87-90.

- Fithry Abshoril, 2016, *Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Hak Milik yang Digunakan oleh Negara untuk Kepentingan Umum*, *Jendela Hukum*, Vol.2(1): 60-64.
- Gangga Santi Dewi, 2017, *Konflik Tentang Ganti Rugi pada Tanah Timpang Tindih*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.5(2): 48-50.
- Hendry Dwi Cahyo, 2014, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Peralihan Tanah*, *PCD Journal*, Vol.11(2): 200-223.
- Iskatrina, 2011, *Ketidakharmisan Pelaksanaan Fungsi Badan Pertanahan Nasional terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia*, *Cakrawala Hukum*, Vol.3(2): 62-66.
- Mulyana Darusman, 2016, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7(2): 110-112.
- Permadi Yohanes, 2012, *Hasil dari Fungsi dan Peran Jabatan di Wilayahang Jakarta*, *Jurnal Law Reform*, Vol.1(1): 33.
- Siska Devi S, 2013, *Tinjauan Hukum terhadap Kontrak Jual-Beli Tanah*, *Jurnal Civil Hukum*, Vol.6(2): 50.
- Sri Regan, 2016, *Cara-cara Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda*, *Humanier Binus Jurnal*, Vol.2(1); 70-76.
- Sri Winarsi, 2008, *Wewenang Pertanahan di Era Otonomi*, *Jurnal Yuridika*, Vol.10(2): 211.
- Sulistio Harjo dkk, 2017, *Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Timpang Tindih (Overlapping) Bidang Tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik dan Penyelesaian di Kabupaten Sleman*, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.11(2): 50-77.
- Urip Santoso, 2010, *Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pribadi*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.8(1): 40.
- Wayu Nindyah, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Tergugat dalam Sertifikat Ganda*, *Fiat Justista*, Vol.9(2): 88.

**Tesis:**

Dennys Andreass Suppoto, 2016, Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Ganda dengan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah [Tesis], Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dewi Zulkhairnain, 2013, Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (*Overlapping*) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya [Tesis], Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Fitriyani Dwi Nurhayati, 2014, Perlindungan Hukum bagi Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-sel) [Tesis], Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hardianti Hasan, 2017, Analisis Penyelesaian Sertifikat Ganda di Kota Makassar (Studi Kasus Sertifikat Ganda No.26/G/2014/PTUN.MKS) [Tesis], Makassar: Universitas Hasanudin Makassar.

Kirana Margaretha Dewi, 2012, Sertifikat Ganda Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156/K/TUN/2005 [Tesis], Jakarta: Universitas Indonesia

Totalis Tyas Inung, Perlindungan Hukum Bagi Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 04/G.TUN/2001/PTUN.YK) [Tesis], Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

**Undang-undang:**

R.I., Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”

R.I., Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Badan Pertanahan Nasional”

R.I., Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang “Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”

R.I., Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008 tentang “Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan”

R.I., Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang “Tata Kerja Majelis Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional”

### **Internet**

Anonim, “Badan Pertanahan Nasional”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pertanahan\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional), diunduh pada hari Rabu, 15 November 2017, Pukul 23.20 WIB

Anonim, “Tujuan Pendaftaran Tanah”,  
<https://dunianotaris.wordpress.com/2011/04/12/tujuan-pendaftaran-tanah/>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB

Anonim, “Penyelesaian Masalah Pertanahan”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diunduh pada tanggal 10 Januari 2018, Pukul 22.40 WIB

Anonim, “Asal-Usul Kota Tasikmalaya”,  
<https://tasikmalayakota.go.id/>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 10.17 WIB